



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG**

LAPORAN

**KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ) TAHUN 2024**

Badan Kesbangpol Kab. Belitung

Jalan Anwar Nomor 03 Kecamatan Tanjungpandan

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG**

Tanjungpandan, Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 telah selesai penyusunannya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang transparan dan akuntabel. Selain itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya “good governance”, yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tanjungpandan, Januari 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BELITUNG,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Belitung government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG' around the perimeter and 'BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'FEDY MALONDA, SH' and the title 'Pembina Utama Muda' are printed, followed by the NIP number 'NIP. 1967910041998031008'.

FEDY MALONDA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 1967910041998031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
I.1 Latar Belakang	- 1 -
I.2 Dasar Hukum.....	- 2 -
I.3 Maksud dan Tujuan.....	- 3 -
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH... - 4 -	
II.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung	- 4 -
II.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	- 5 -
II.3 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	- 7 -
II.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	- 29 -
II.5 Penghargaan	- 30 -
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BELITUNG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BELITUNG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023.....	- 31 -
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	- 32 -
IV.1 Anggaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan	- 32 -
IV.2 Permasalahan Dan Solusi	- 32 -
BAB V PENUTUP	- 33 -

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA) Tahun 2024 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2024 Bupati Belitung berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Belitung. LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024.

LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2024 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Belitung. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Belitung, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Belitung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung sebagai pengampu urusan Pemerintahan Umum berkewajiban menyampaikan LKPJ Perangkat Daerah kepada Bupati Belitung sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

I.2 Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024;
 27. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
 29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024 – 2026;
 30. Peraturan Bupati Belitung Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 74);

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Kerja, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang kesatuan bangsa dan politik.

I.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama Tahun Anggaran 2024 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung

Tabel II.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Baseline 2022	Target 2023	Realisasi	Penanggung Jawab	Ket
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,38	74,21		Diskominfo Bappeda	
2.	Angka Kemiskinan	persen	6,45	5,41		Diskominfo Bappeda	
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,31	71,47		Diskominfo Dinkes	
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,74	8,56		Diskominfo Dindikbud	
5.	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	14.045.000	14.049.000		Diskominfo Bappeda	
6.	Status Desa Maju	Desa	37	31		DPPKBPM	
7.	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	BB		Inspektorat Setda	
8.	Opini BPK		WTP	WTP		Setda BPKAD Inspektorat	
9.	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		B	BB		Setda Inspektorat Bappeda	
10.	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	75,44	76		BKPSDM	
11.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	86,88	88		Sekretariat Daerah	
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,71	4,4 – 5,1		Diskominfo Bappeda	
13.	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang	266.126	400.000		Dinas Pariwisata	
14.	Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	26,82	27,83		Diskominfo DKPP Disperik	
15.	Nilai omset koperasi	Rupiah	89.183.859	85.562.956		Dinas KUKMPTK	
16.	Nilai omset usaha mikro	Rupiah	1.699.874.043	1.957.050,000		Dinas KUKMPTK	
17.	Nilai investasi	Rupiah	3.707.410,25	5.023.529		Dinas PMPTSP	
18.	Persentase pemenuhan	Persen	58,85	59,94		Dinas PUPR	

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Baseline 2022	Target 2023	Realisasi	Penanggung Jawab	Ket
	infrastruktur wilayah						
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		69,25	68,88		Dinas Lingkungan Hidup	
20.	Persentase cakupan pelayanan persampahan	Persen	16,73	16		Dinas Lingkungan Hidup	

II.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja perangkat daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Belitung unsur penunjang urusan perencanaan tahun 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1.	Persentase Meningkatnya Penanganan Konflik	persen	100	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Persentase Meningkatnya Penanganan Konflik Tahun 2024 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan penyelesaian permasalahan konflik telah difasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang bekerjasama dengan OPD atau pun instansi vertikal terkait sesuai data dan pelaporan penanganan konflik pada Tahun 2024 dapat di selesaikan di mulai dari tingkat yang paling rendah.

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1.	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi dan keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100
2.	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen	75	75	75	85.6
3.	Persentase Pelayanan Administrasi	Persen	100	100	100	100

	Perkantoran Perangkat Daerah					
4.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100
5.	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100
6.	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Persen	100	100	100	99,87
7.	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100	81,85
8.	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	Persen	100	100	100	92,87

Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100 %.
Adapun faktor pendukung adalah telah terealisasi seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.
2. Persentase (%) Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah sebesar 75% persen naik dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 85,6 %.
Adapun faktor pendukung adalah sebagian besar pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen dan pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan tupoksi Badan Kesbangpol sehingga ada penyesuaian bobot dimensi indeks profesionalitas ASN.
3. Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah sebesar 100% persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100 %.
Adapun faktor pendukung adalah telah terealisasi seluruh kegiatan rutin yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung
4. Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100 %.
Adapun faktor pendukung adalah telah terealisasi seluruh urusan kegiatan rutin yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung

5. Persentase (%) Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan sebesar 100 % persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100 %.

Adapun faktor pendukung adalah secara keseluruhan seluruh rangkaian kegiatan wawasan kebangsaan yang melibatkan masyarakat dan pelajar telah dilaksanakan.

6. Persentase (%) Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik sebesar 100 % persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 98,7 %.

Adapun faktor pendukung adalah seluruh kegiatan baik pendidikan politik dan bimtek parpol bagi pengurus parpol serta berkas pencairan bantuan hibah parpol, hibah KPU, dan Hibah kepada Bawaslu telah dilaksanakan dengan tepat waktu.

7. Persentase (%) Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 100 % persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 81,85 %.

Adapun faktor pendukung adalah secara keseluruhan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya telah dilaksanakan.

8. Persentase (%) Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat sebesar 100 % persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 92,87 %.

Adapun faktor pendukung adalah seluruh pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga tingkat penanganan konflik yang ada di masyarakat telah diatasi di Tahun 2024 dengan adanya kerjasama dengan forkopimda dan tim intelijen instansi vertikal.

II.3 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

II.3.1 Urusan Wajib/Pilihan/Penunjang

II.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar/Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/Pilihan

A. Pelaksanaan Urusan Perencanaan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada unsur penunjang urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah 3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	100	4.315.314.060	5.210.764.860
	Realisasi		-	92,8	3.535.324.794	4.600.006.759
	%		-	100	89,54	91,83
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Output :</i> Dokumen hasil perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah <i>Outcome :</i> Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan				
	Anggaran		-	10 Dok	0	13.953.700
	Realisasi		-	9 Dok	0	5.233.200
	%		-	100	0	37,50
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Anggaran		-	3 Dok	0	2.493.500
	Realisasi		-	3 Dok	0	2.283.400
	%		-	100	0	91,57
	2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	1.937.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	1.541.800
	%		-	100	0	79,59
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	2.987.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	0
	%		-	100	0	0
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	2.996.700

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Realisasi		-	1 Dok	0	0
	%		-	100	0	0
	5.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	Anggaran		-	3 Lap	0	3.539.500
	Realisasi		-	3 Lap	0	1.408.000
	%		-	0	0	39,77
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Output</i> : Dokumen keuangan perangkat daerah <i>Outcome</i> : Terpenuhinya dokumen sesuai peraturan				
	Anggaran		22 OB	3 Dok	3.930.433.360	3.928.482.860
	Realisasi		22 OB	3 Dok	3.160.557.039	3.467.007.081
	%		100	100	80,41	88,25
	Sub Kegiatan : 1.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				
	Anggaran		22 OB	21 OB	3.930.433.360	3.923.482.860
	Realisasi		22 OB	21 OB	3.160.557.039	3.462.119.781
	%		100	100	80,41	88,24
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					
	Anggaran		22 OB	1 Lap	0	2.000.000
	Realisasi		22 OB	1 Lap	0	1.954.000
	%		100	100	0	97,7
	3. Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Anggaran		22 OB	2 Dok	0	3.000.000
	Realisasi		22 OB	2 Dok	0	2.933.300
	%		100	100	0	97,7
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Output</i> : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah <i>Outcome</i> : Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	100	0	140.500.000
	Realisasi		-	100	0	82.966.221
	%		-	100	0	59,05
	Sub kegiatan :					
	1.Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				
	Anggaran		-	1 Paket	0	10.500.000
	Realisasi		-	1 Paket	0	10.000.000
	%		-	100	0	95,23
	2.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tuisi	jumlah pegawai yang mengikuti tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				
	Anggaran		-	15 Orang	0	130.000.000
	Realisasi		-	7 Orang	0	72.966.221
	%		-	46,67	0	56,12
	Kegiatan :					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Output</i> : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah <i>Outcome</i> :terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah				
	Anggaran		100	100	193.750.700	363.573.300
	Realisasi		100	100	181.845.513	342.218.168
	%		100	100	93,85	94,12
	Sub Kegiatan :					
	1.Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				
	Anggaran		1 Paket	1 Paket	2.000.000	5.000.000
	Realisasi		1 Paket	1 Paket	2.000.000	5.000.000
	%		100	100	100	100
	2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				
	Anggaran		2 Paket	2 Paket	40.712.800	49.994.800
	Realisasi		2 Paket	2 Paket	36.485.000	49.645.800
	%		100	100	89,62	99,30
	3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	1 Paket	0	7.000.000
	Realisasi		-	1 Paket	0	4.901.500
	%		-	100	0	70,02
	4.Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				
	Anggaran		2 Paket	2 Paket	38.826.500	69.211.400
	Realisasi		2 Paket	2 Paket	38.695.374	69.037.714
	%		100	100	99,66	99,74
	5.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				
	Anggaran		1 Paket	1 Paket	22.211.400	25.000.000
	Realisasi		1 Paket	1 Paket	15.415.000	18.458.800
	%		100	100	69,40	73,83
	6.Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan				
	Anggaran		-	1 Dok	0	7.000.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	4.300.000
	%		-	100	0	61,42
	7.Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyeleggaraan rakor dan Konsultasi SKPD				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	90.000.000	200.367.500
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	89.250.139	190.874.354
	%		100	100	99,17	95,26
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Output</i> : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Outcome</i> : Jenis Barang Milik Daerah				
	Anggaran		-	2 Jenis	-	416.250.000
	Realisasi		-	1 Jenis	-	369.000.000
	%		-	100	-	88,64
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Anggaran		-	2 Jenis	-	416.250.000
	Realisasi		-	1 Jenis	-	369.000.000

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	%		-	100	-	88,64
	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Output</i> : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah <i>Outcome</i> : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				
	Anggaran		12 Lap	100	155.000.000	158.499.600
	Realisasi		12 Lap	100	136.234.642	148.062.169
	%		100	100	87,89	93,41
	Sub Kegiatan : 1.Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat				
	Anggaran		-	12 Lap	0	2.500.000
	Realisasi		-	12 Lap	0	2.500.000
	%		-	100	0	100
	2.Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	56.000.000	56.000.000
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	37.234.642	45.562.769
	%		100	100	66,49	81,36
	3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	99.000.000	999.999.600
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	99.000.000	999.999.400
	%		100	100	100	99,99
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<i>Ouput</i> :Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur <i>Outcome</i> : Barang milik daerah dalam kondisi baik				
	Anggaran		11 Unit	4 Jenis	36.130.000	189.505.000
	Realisasi		11 Unit	4 Jenis	28.343.800	185.519.920
	%		100	100	78,45	97,89
	Sub Kegiatan : 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan					

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					
	Anggaran		11 Unit	10 Unit	72.750.000	61.250.000
	Realisasi		11 Unit	10 Unit	64.658.790	58.732.750
	%		100	100	88,87	95,89
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				
	Anggaran		-	2 Unit	-	18.000.000
	Realisasi		-	1 Unit	-	16.645.000
	%		-	100	-	99,99
	3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				
	Anggaran		-	49 Unit	0	40.255.000
	Realisasi		-	12 Unit	0	40.160.000
	%		-	92,31	0	99,76
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				
	Anggaran		-	4 Unit	0	70.000.000
	Realisasi		-	4 Unit	0	69.982.170
	%		-	100	0	99,97
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan				
	Anggaran		3 Dok		759.162.400	
	Realisasi		3 Dok		704.144.903	
	%		100		92,75	
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	<i>Output</i> : Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan <i>Outcome</i> : Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ideologi pancasila dan karakter kebangsaan				
	Anggaran		1 Dok	3 Dok	759.162.400	1.294.411.300
	Realisasi		1 Dok	3 Dok	704.144.903	1.188.686.101
	%		100	100	92,75	91,83
	Sub Kegiatan :					
	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan				
	Anggaran		-	75 Orang	0	1.185.303.300
	Realisasi		-	75 Orang	0	1.105.186.101
	%		-	100	0	93,24
	2. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan				
	Anggaran		40 Orang	300 Orang	759.162.400	109.108.000
	Realisasi		40 Orang	300 Orang	704.144.903	83.500.000
	%		100	100	92,75	76,52
3.	Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Parpol dan lembaga pendidikan politik yang mendapatkan pendidikan politik				
	Anggaran		3 Dok	100	13.527.721.350	24.138.045.300
	Realisasi		3 Dok	100	13.512.473.676	23.828.769.350
	%		100	100	99,88	98,71

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik	<i>Ouput</i> : Meningkatnya pemahaman politik parpol dan lembaga pendidikan <i>Outcome</i> : Laporan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik				
	Anggaran		3 Dok	100	13.527.721.350	24.138.045.300
	Realisasi		3 Dok	100	13.512.473.676	23.828.769.350
	%		100	100	99,88	98,71
	Sub Kegiatan : 1.penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah kebijakan di bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		13 Dok	12 Dok	13.420.087.400	23.836.550.300
	Realisasi		13 Dok	12 Dok	13.420.087.400	23.770.869.350
	%		100	100	100	99,72
	2.pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		50 Orang	210 Orang	59.958.250	60.000.000
	Realisasi		50 Orang	210 Orang	58.382.021	57.900.000
	%		100	100	97,37	96,5
	3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		2 Lap	4 Lap	47.675.700	241.495.000
	Realisasi		2 Lap	4 Lap	34.004.255	222.043.648
	%		100	100	71,32	91,94
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	124.893.500	591.050.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	115.185.035	450.532.562
	%		100	100	92,22	76,22
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Output</i> : Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya <i>Outcome</i> : Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	124.893.500	591.050.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	115.185.035	450.532.562
	%		100	100	92,22	76,22
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasi kegiatan P4GN				
	Anggaran		-	100 Orang	69.855.000	75.800.000
	Realisasi		-	100 Orang	59.282.165	43.500.000
	%		-	100	84,86	57,38
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan pelaksanaan FKUB				
	Anggaran		1 Dok	100 Orang	129.540.800	429.000.000
	Realisasi		1 Dok	90 Orang	110.904.894	361.564.792
	%		100	75	85,61	84,28
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan tim PAKEM				
	Anggaran		1 Dok	1 Lap	24.938.500	86.250.000
	Realisasi		1 Dok	1 Lap	21.996.350	45.467.770
	%		100	100	88,20	52,71
6.	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	800.498.900	1.224.715.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	790.987.321	999.072.115
	%		100	100	98,81	81,57
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	<i>Output</i> : Meningkatnya pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah <i>Outcome</i> : Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	802.200.000	1.224.715.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	791.513.177	999.072.115
	%		100	100	98,66	81,57
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang melakukan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah				
	Anggaran		3 Lap	75 Orang	63.900.000	194.970.000
	Realisasi		3 Lap	57 Orang	63.900.000	122.943.454
	%		100	76	100	63,05
	2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		penanganan konflik di daerah				
	Anggaran		-	4 lap	0	161.995.000
	Realisasi		-	3 lap	0	112.054.192
	%		-	75	0	69,14
	3.Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota				
	Anggaran		1 Dok	1 Dok	738.300.000	867.750.000
	Realisasi		1 Dok	1 Dok	727.613.177	764.074.469
	%		100	100	98,55	88,05

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

(1) Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa dan pembauran kebangsaan ,Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.294.411.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.188.686.101,00 atau setara dengan 91,83 % *Output* kegiatan adalah Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan. *Outcome* kegiatan adalah Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Terbatasnya sumber daya aparatur pengelola kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa dan pembauran kebangsaan ,Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.185.303.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.105.186.101,00 atau setara dengan 93,24 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat dan pelajar dalam kegiatan paskibraka dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Kurang sumber daya manusia yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa dan pembauran kebangsaan

,Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.108.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 83.500.000,00 atau setara dengan 76,52 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Kurang sumber daya manusia yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.138.045.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.828.769.350,00 atau setara dengan 98,71 % *Output* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman politik parpol dan lembaga pendidikan. *Outcome* laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan dan bantuan hibah kepada parpol, KPU, Bawaslu, Kodim dan Polres telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (1) Sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.836.550.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.770.869.350,00 atau setara dengan 99,72 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan Kegiatan Simpoldagri dan bantuan hibah kepada parpol, KPU, Bawaslu Kodim dan Polres telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (2) Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 57.9000.000,00 atau setara dengan 96,5 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan Bimtek administrasi bantuan keuangan parpol dan verifikasi bantuan keuangan

parpol telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

- (3) Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.495.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 222.043.648,00 atau setara dengan 91,94 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan pemantauan perkembangan politik di daerah telah dilaksanakan dengan melakukan monitoring persiapan pemilu di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 591.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 450.532.562,00 atau setara dengan 76,22 % *Output* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya. *Outcome* laporan hasil Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Adapun pendorong faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kegiatan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat (PAKEM) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (1) Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 43.500.000,00 atau setara dengan 57,38 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

- (2) Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, FKUB

dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 361.564.792,00 atau setara dengan 84,28 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

- (3) Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.467.770,00 atau setara dengan 52,71 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh Kegiatan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat (PAKEM) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

4. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.224.715.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 999.072.115,00 atau setara dengan 81,57 %. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah. *Outcome* laporan hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Adapun pendorong faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan Forum Kewaspadaan Dini di Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini serta Tim Penganangan Konflik Sosial serta Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah dilaksanakan seluruhnya baik dari segi pelaksanaan kegiatan atau pun realisasi anggarann yang dilaksanakan.

- (1) Sub kegiatan pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.970.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 122.943.454,00 atau setara dengan 63,05%.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan Forum Kewaspadaan Dini di Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini telah dilaksanakan yang didukung oleh seluruh tim yang memberikan laporan serta situasi tentang ipoleksosbudhankam.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (2) Sub kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.995.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 122.054.192,00 atau setara dengan 69,14 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Kewaspadaan Dini serta Tim Penganangan Konflik Sosial telah dilaksanakan yang didukung oleh seluruh tim yang memberikan laporan serta situasi tentang ipoleksosbudhankam.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan..

- (3) Sub kegiatan pelaksanaan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 867.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 764.074.469,00 atau setara dengan 88,05 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah dilaksanakan dengan kerjasama antara Tim Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.593.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.233.200,00 atau setara dengan 37,50 %. *Output* kegiatan adalah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran secara keseluruhan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.493.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.283.400,00 atau setara dengan 91,57 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.937.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.541.800,00 atau setara dengan 79,59 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

- (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.987.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau setara dengan 0 %.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.996.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau setara dengan 0 %.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.539.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.408.000 atau setara dengan 39,77 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.928.482.860,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.467.007.081,00 atau setara dengan 88,25 %. *Output* kegiatan adalah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen sesuai peraturan.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.462.119.781,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.923.482.860,00 atau setara dengan 88,24 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.954.000,00 atau setara dengan 97,7 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

- (3) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.933.300,00 atau setara dengan 97,7 %.
- Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan.
- Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 82.966.221,00 atau setara dengan 59,05 %.
- Output* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen administrasi umum perangkat daerah.
- Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya serta Pendidikandan Pelatihan Pegawai berdasarkan tuisi baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
- Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau setara dengan 95,23 %.
- Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan.
- Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tuisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 72.966.221,00 atau setara dengan 56,12 %.
- Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan.
- Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Kurangnya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tupoksi dari Badan Kesbangpol.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.573.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 342.218.168,00 atau setara dengan 94,12 %.
- Output* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen administrasi umum perangkat daerah.
- Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 atau setara dengan 100 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran belanja alat-alat telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar 100%

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.994.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 49.645.800,00 atau setara dengan 99,30 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran belanja alat-alat telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.901.500,00 atau setara dengan 70,02 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.211.400,00 dan realisasi sebesar Rp. 69.037.714,00 atau setara dengan 99,74%.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak dan keperluan makan dan minum pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 18.458.800,00 atau setara dengan 69,40 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.367.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 190.874.354,00 atau setara dengan 95,26 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan belanja perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai dengan keperluan dan tujuan perjalanan dinas.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 369.000.000,00 atau setara dengan 88,64 %. *Output* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur. *Outcome* kegiatan Jenis Barang Milik Daerah

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 369.000.000,00 atau setara dengan 88,64 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.499.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 148.062.169,00 atau setara dengan 93,41 %. *Output* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta pelayanan jasa pelayanan umum kantor baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan serta beberapa sub kegiatan yang tidak di anggarkan dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan.

(1) Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,00 atau setara dengan 100 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyediaan jasa surat menyurat telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (2) Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.562.769,00 atau setara dengan 81,36 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyediaan untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (3) Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.999.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 99.999.400,00 atau setara dengan 99,99 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyediaan gaji pegawai kontrak/honoror pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung telah

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- g. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.505.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 185.519.920,00 atau setara dengan 97,89 %. *Output* kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. *Outcome* kegiatan adalah barang milik daerah dalam kondisi baik

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan serta beberapa sub kegiatan yang tidak di anggarkan dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan.

- (1) Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 58.732.750,00 atau setara dengan 95,89 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (2) Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 16.645.000,00 atau setara dengan 99,99 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (3) Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.255.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 40.160.000,00 atau setara dengan 99,76 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang ada pada Badan Kesbangpol telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

- (4) Sub Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 69.982.170,00 atau setara dengan 99,97 %.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang ada pada Badan Kesbangpol telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

II.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis merupakan kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel II.5 Kebijakan Strategis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Mengadakan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh pelajar, masyarakat, pegawai yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Menjadikan seluruh masyarakat terbebas dari bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

II.5 Penghargaan

Tabel II.6 Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Perangkat Daerah Penerima Penghargaan
1	P4GN Award 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung

**BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BELITUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BELITUNG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

DPRD Kabupaten Belitung melalui panitia khusus DPRD Kabupaten Belitung, melakukan pembahasan materi LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2024. Hasil pembahasan Pansus tersebut ditetapkan sebagai Keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung atas LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi berupa catatan strategis disampaikan kepada Bupati Belitung melalui Rapat Paripurna untuk dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**TABEL III.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung
Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024**

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
-	-	-	-

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

IV.1 Anggaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.

IV.2 Permasalahan Dan Solusi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Belitung yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Belitung membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Kabupaten Belitung pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk **“Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”**.